

STRATEGI *INSTITUTIONAL BALANCING* DI KAWASAN ASIA PASIFIK

Natasya Juliandini¹

Abstract

The Asia-Pacific region is a very strategic region for cooperation in the economic and security fields. This makes this region very contested by the two countries of hegemony in the economic field, namely, China and the United States. To achieve these interests, China and the United States must contribute to the region, one of which is conducting Institutional balancing with institutions that are quite influential in the Asia-Pacific region such as the ASEAN Regional Forum (ARF), ASEAN Plus Three (APT), East Asia Summit (EAS). And this paper will discuss why the United States changed its foreign policy from the Middle East to Asia-Pacific region. The dynamic of the region shows that China plays an important role along with its national capability improvement. The increase in China's national capability is seen as a challenge to national interests, as well as security for the United States alliance states in the Asia-Pacific region. Using an analytical framework based on the Balance of Threat theory, the author concludes that there is a strong relation between China's national capability improvements with the implementation of US rebalancing strategy to the Asia-Pacific region.

Keywords: *Institutional Balancing, Regional Cooperation, Asia-Pacific*

Abstrak

Kawasan asia-pasifik merupakan kawasan yang sangat strategis untuk melakukan kerjasama dibidang ekonomi maupun keamanan. Hal tersebut menjadikan kawasan ini sangat diperebutkan oleh dua negara hegemoni dalam bidang ekonomi yaitu, China dan Amerika Serikat. Untuk mencapai kepentingan tersebut, China dan Amerika Serikat harus ikut berkontribusi di Kawasan tersebut, salah satunya melakukan Institutional balancing dengan institusi-institusi yang cukup berpengaruh di kawasan Asia-Pasifik seperti Forum Regional ASEAN (ARF), ASEAN Plus Three (APT), East Asia Summit (EAS). Dan tulisan ini mencoba menganalisa alasan Amerika Serikat mengubah fokus kebijakan luar negerinya dari Kawasan Timur Tengah ke Kawasan Asia-Pasifik. Dinamika kawasan yang terjadi, China memegang peran penting seiring dengan peningkatan kapabilitas nasionalnya. Peningkatan kapabilitas nasional China tersebut dilihat sebagai tantangan bagi kepentingan nasional, sekaligus keamanan bagi negara aliansi Amerika Serikat di Kawasan Asia-Pasifik. Dengan menggunakan kerangka analisa berdasarkan teori *Balance of Threat*, penulis menyimpulkan bahwa terdapat keterkaitan yang sangat kuat antara peningkatan kapabilitas nasional China dengan penerapan strategi *rebalancing* Amerika Serikat ke Kawasan Asia-Pasifik.

Kata Kunci: *Institutional Balancing, Kerjasama Regional, Asia-Pasifik*

¹ Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Jl. Ir. H. Djuanda No. 95, Cempaka Putih, Ciputat Timur, Tangerang Selatan Email: tasya.jlndn17@mhs.uinjkt.ac.id

Pendahuluan

Dalam Hubungan Internasional pasti kita tidak asing dengan kata “*Balance of Power*” yang mana hal tersebut merupakan bagian dari perspektif Realisme dalam memandang kerjasama antara negara ataupun hubungan interaksi suatu negara satu sama lain. Perspektif Realisme tersebut benar terjadi pada saat masa perang dingin yang mana pada saat itu munculnya dua kubu atau bipolar antara Amerika Serikat dengan Uni Soviet yang mana pada saat itu kedua negara tersebut berperang dalam menyebarkan paham ideologi mereka yaitu paham Kapitalisme dan paham Komunisme.

Sedangkan, negara lainya bergabung aliansi dengan salah satu kubu tersebut yang biasanya mereka beraliansi dengan satu ideologi untuk menciptakan *Balance of Power* antara Amerika Serikat dan Uni Soviet, namun ada juga negara yang tidak tergabung dengan aliansi atau memilih untuk bersikap netral. Selain membuat aliansi, pada masa perang dingin Amerika Serikat dan Uni Soviet melakukan *Balance of Power* dengan cara mengembangkan senjata nuklir sampai akhirnya Uni Soviet runtuh dan mengakhiri perang dingin antara Amerika Serikat dengan Uni Soviet.

Berakhirnya perang dingin tidak menjadikan *Balance of Power* ikut berakhir. Karena setelah perang dingin berakhir, *Balance of Power* bertransisi menjadi *Institutional Balancing*. *Institutional Balancing* menjadi salah satu strategi yang oleh beberapa negara setelah perang dingin berakhir, yang mana strategi ini dipakai oleh Amerika Serikat, China, Australia, Korea Selatan dan Jepang setelah terjadinya krisis finansial global (He, 2018). Dalam perkembangannya *Institutional Balancing* selalu menjadi strategi yang digunakan oleh negara-negara dalam mencapai suatu kepentingan negaranya. Namun, tiap-tiap

negara memiliki strategi *Institutional Balancing* yang berbeda-beda seperti *Inclusive Institutional Balancing*, *Exclusive Institutional Balancing*, dan *Inter-Institutional Balancing* (He, 2015). Model dari strategi ini digunakan oleh negara tergantung dari situasi dan kondisi negara tersebut yang sekiranya tepat untuk menyelesaikan permasalahan.

Di kawasan Asia–Pasifik tidak jarang strategi *Institutional Balancing* ini digunakan. Negara – negara di kawasan Australia pasifik biasanya menggunakan strategi ini untuk meningkatkan perekonomian negaranya atau pun meningkatkan keamanan negaranya. Dan strategi tersebut juga digunakan oleh negara China dan Amerika Serikat untuk mendistribusikan kekuasaannya di kawasan tersebut. Yang mana sering kali digunakan oleh ASEAN dan China untuk menanggulangi kekuatan Amerika Serikat di kawasan Asia-Pasifik dan tidak jarang juga digunakan ASEAN untuk melakukan *balancing* terhadap China maupun Amerika Serikat

Artikel ini akan memiliki 3 bagian diskusi pembahasan. Diskusi pertama akan membahas mengenai perspektif teori Hubungan Internasional dalam melihat sebuah institusi. Diskusi kedua membahas bagaimana bagaimana tatanan internasional mengalami masa transisi. Dan Diskusi ketiga membahas model strategi *Institutional Balancing* apa yang digunakan di kawasan Asia-pasifik.

Topik mengenai *Institutional Balancing* sangat menarik dibahas. Karena sekarang ini dalam hubungan internasional tidak lagi membicarakan interaksi antar negara saja, namun sudah banyak institusi – institusi internasional yang membuktikan bahwa sebuah institusi mampu melakukan kerjasama untuk mencapai kepentingan negaranya. Dan hal lain yang membuat saya

tertarik untuk membahas topik ini adalah khususnya di kawasan Asia Pasifik, alasan negara – negara tersebut melakukan *Institutional Balancing* di kawasan tersebut. Tulisan ini diharapkan dapat menjadi wadah dalam melihat pentingnya keunggulan negara dan faktor-faktor lain dalam kerjasama internasional yang dibentuk oleh pihak yang bersangkutan (HAMILTON, 1991).

Dalam melihat peran sebuah Institusi di dalam Politik Internasional, menjadi perdebatan selama beberapa dekade dalam studi Hubungan Internasional. Seperti Neoliberal, menawarkan teori “*Supply-Side*” yang berfokus pada fungsi peran sebuah institusi internasional dalam memfasilitasi kerjasama antar negara. Sedangkan Neorealis, menggunakan teori “*Demand-Side*” untuk menanyakan bagaimana penggunaan Neoliberal dalam keamanan internasional (He, 2008b). Neorealis berpendapat bahwa yang diinginkan suatu negara dalam dunia yang anarki ini adalah *Relative Gain* yang mana tidak bisa di dapat melalui sebuah Institusi Internasional. Neorealisme sering menghadapi tantangan untuk menjelaskan bagaimana dinamika keamanan di Asia dalam Institusional Multilateral. Dalam masalah keamanan, Neorealisme beranggapan bahwa pembagaian kekuatan menentukan perang atau tidaknya suatu negara didalam politik internasional. Dilihat dari sistem internasional yang pada dasarnya bersifat anarki dan negara sebagai aktor dalam sistem tersebut. Neoliberalisme membantah pandangan pesimis Neorealis dalam melihat kerjasama internasional. Oleh karena itu, Neoliberalisme menawarkan pentingnya interdipendensi dan memperkenalkan peran institusional dalam mengurangi *security dilemma* dan meningkatkan kerjasama diantara negara-negara (He, 2008b). Neoliberal berhasil membuktikan bantahannya terhadap argumen yang dikemukakan oleh Neorealis dalam bahasan

keamanan di kawasan Asia, yang mana terjadinya peningkatan institusi regional seperti *Association of Southeast Asian Nations* (ASEAN), *ASEAN Regional Forum* (ARF), *ASEAN Free Trade Area* (AFTA), dan *ASEAN Plus Three*. Namun kelemahan yang dimiliki oleh Neoliberal adalah mereka tidak bisa pertanyaan mengenai kapan dan kondisi seperti apa suatu institusi bisa mengubah perilaku negara yang awalnya memiliki tujuan *relative gains* menjadi *absolute gains*. Selain Neorealis dan Neoliberal, adapula konstruktivisme sosial yang membawa varian ideasional seperti norma, identitas, dan budaya kedalam studi tentang keamanan di kawasan Asia. konstruktivisme juga menekankan bahwa ASEAN akan beralih menuju *security community*, dan juga negara-negara anggotanya mengesampingkan penggunaan kekuasaan terhadap satu sama lain untuk menyelesaikan perselisihan mereka secara damai (He, 2008).

Berakhirnya perang dingin menyebabkan banyaknya Institusi Regional Internasional yang bermunculan, terutama di kawasan Asia-Pasifik. Institusi-institusi tersebut menjadikan teori Intitusional lebih tepat dalam menjelaskan apa yang sedang terjadi pada saat itu. Pada perkembangannya banyak bermunculan teori dan kerangka baru dalam menjelaskan hubungan antar negara di dunia internasional. Salah satunya dalam teori institusional yang memperkenalkan Realisme Institusional untuk menjelaskan banyaknya institusi kewanman yang muncul di kawasan Asia-Pasifik setelah perang dingin berakhir. Teori Realisme Institusional merupakan gabungan dari teori *Balance of Power* yang dikemukakan oleh Neorealis dan kebijakan interdipendensi dari Neoliberalis, yang menjadikan teori ini mengemukakan bahwa (1) tingginya tingkat ketergantungan ekonomi suatu negara dengan negara lain menjadikan suatu negara memilih strategi *balancing* yang baru yaitu *Institutional*

Balancing dari pada membuat aliansi, (2) penyebaran kapabilitas di sistem regional menentukan bagaimana suatu negara melakukan model *Institutional Balancing* – nya (He, 2008b). Seperti yang dikemukakan oleh Neorealis bahwa perilaku negara dalam dunia yang anarki adalah melakukan *balancing*, definisi *balancing* menurut Neorealis mengarah pada *power balancing* atau *hard balancing* dalam lingkup militer. Sama halnya dengan Realisme Institusional dalam melihat perilaku negara, namun lebih mengarah kepada *Institutional Balancing* atau *soft balancing*. Didalam *power balancing* terdapat dua model perilaku yaitu *Internal Military Balancing* dan *External Military Balancing*. Sedangkan, didalam Realisme Institusional terdapat tiga model strategi yang digunakan dimana suatu negara memutuskan untuk melakukan *Institutional Balancing* untuk mengikat satu sama lain yaitu *Inclusive Institutional Balancing*, *Exclusive Institutional Balancing*, dan *Inter-Institutional Balancing*.

Pembahasan

Tatanan internasional atau *international order* menjadi salah satu bahasan yang diperdebatkan cukup lama dalam hubungan internasional. Seperti yang dijelaskan oleh Joseph Nye didalam bukunya yang berjudul *Understanding International Conflict*, setiap teori-teori dalam hubungan internasional memiliki penekanan yang berbeda dalam mendefinisikan tatanan internasional itu sendiri (Nye, 2003). Relis melihat tatanan internasional melalui struktur atau pembagaian kekuasaan antar negara, liberal menghubungkan itu semua dengan sebuah institusi dan aturan, sedangkan konstruktivis memandang suatu tatanan diperebutkan oleh berbagai pihak dan oleh karena itu tidak ada istilah nilai netral (Nye, 2003). Namun definisi tatanan internasional yang cocok untuk artikel ini adalah definisi yang dikemukakan oleh Henry Kissinger

yang menyebutkan bahwa ada dua komponen dalam menjelaskan tatanan internasional, yang mana satu set aturan yang umumnya diterima untuk menjelaskan batasan-batasan suatu tindakan yang diperbolehkan dan *balance of power* yang mendesak batasan dimana peraturan bisa runtuh, dan menolak satuan unit politik untuk menaklukan yang lain (Kissinger, 2014). Dengan kata lain, institusi dan *Balance of power* adalah dua unsur utama dari tatanan internasional.

Pada awalnya *balance of power* memang sering digunakan di tatanan internasional dalam berinteraksi dengan negara lain, yang mana saat itu negara masih memandang bahwa kepentingan nasional suatu negara adalah mencari kekuatan atau kekuasaan. Biasanya *balance of power* akan terjadi apabila adanya bipolarisme yang terbentuk, Seperti pada saat perang dingin terjadi. Perang dingin yang terjadi dikarenakan adanya perang ideologi antara Amerika Serikat yang memiliki ideologi Kapitalisme dan Uni Soviet yang memiliki ideologi Komunisme. Perang ideologi yang terjadi antara dua negara hegemoni pada saat itu menjadikan terbentuknya dua kutub atau bipolar. Dengan berkembangnya jaman, negara-negara melihat bahwa kepentingan didalam suatu negara bukan hanya mencari kekuatan atau kekuasaan saja melainkan ada bidang lain yang harus dicapai untuk mendapatkan keuntungan negara. Oleh karena itu setelah perang dingin berakhir, banyaknya Institusi Regional Internasional yang bermunculan, terutama dikawasan Asia-Pasifik. Munculnya institusi-institusi ini menjadikan *balance of power* bertaransisi menjadi *institutional balancing* dalam berinteraksi dengan negara lain.

Kawasan asia-pasifik merupakan kawasan yang sangat strategis untuk melakukan kerjasama dibidang ekonomi maupun keamanan. Hal tersebut menjadikan

kawasan ini sangat diperebutkan oleh dua negara hegemoni dalam bidang ekonomi yaitu China dan Amerika Serikat. Di asia-pasifik model ekonomi yang berorientasi pada ekspor tidak hanya menciptakan ‘*four tigers*’ pada tahun 1970-an sampai 1990-an, tetapi juga membawa kebangkitan China (*China rise’s*) hingga saat ini. Keadaan Amerika Serikat yang menjadi pusat teknologi dan juga tenaga kerja dari China yang sangat baik di pasar Asia, semuanya berawal dari ledakan ekonomi di asia pada tahun 1990-an yang ditulis dalam laporan *Asian Development Bank* menyatakan bahwa perekonomian di asia semakin terhubung melalui perdagangan, transaksi keuangan, investasi langsung, teknologi, tenaga kerja, dan arus wisatawan, serta hubungan ekonomi lainnya (Asian Development Bank, 2008). Setelah berakhirnya perang dingin, banyak negara yang melakukan *Economic Interdependence*. Dengan adanya *Economic Inrdependence* ini mendorong para pemimpin politik untuk mempertimbangkan cara atau startegi yang digunakan untuk bersaing tanpa perlu melakukan kekerasan atau *hard power*. Bersaing untuk mendapatkan kekuasaan, keamanan dan martabat masih menjadi cara utama untuk negara dibawah anarki. Tetapi, peningkatan biaya ekonomi dan strategi keseimbangan seperti, pembentukan aliansi, dan perlombaan senjata dalam konteks globalisasi dan ekonomi saling berketergantungan, saling mendorong negara-negara untuk mengejar cara atau strategi persaingan yang relatif murah. *Institusional Balancing* adalah strategi *balancing* baru yang dapat digunakan negara untuk mewujudkan tujuan realis mereka didalam sistem internasional.

Institutional balancing merupakan startegi yang mengandalkan lembaga atau institusi multilateral untuk membatasi dan melemahkan kekuatan dan pengaruh saingannya (He, 2009). Inti dari startegi *balancing* adalah mengubah kekuatan relatif

antara suatu negara dengan negara lain. *Balancing tradisional* menekankan pada bagaimana meningkatkan kekuatan negara kita sendiri, baik melalui *internal balancing* seperti senjata atau *external balancing* seperti beraliansi. *Institutional balancing* merupakan salah satu *soft-balancing* yang berfokus pada bagaimana melemahkan atau membatasai kekuatan negara lain untuk mengubah keseimbangan kekuasaan menjadi bantuan untuk negara (He, 2012). Ada tiga jenis *Institutional Balancing* yang diterapkan oleh beberapa negara dan institusi khususnya dikawasan Asia-pasifik untuk membatasi atau melemahkan kekuasaan satu sama lain sejak berakhirnya perang dingin, (1) *inclusive institutional balancing* merupakan strategi *balancing* yang mana suatu negara memasukan negara target kedalam institusi atau lembaga multilateral yang diharapkan dapat membatasi dan membentuk perilaku negara target tersebut. (2) *Exclusive institutional balancing* merupakan strategi *balancing* yang tidak melibatkan atau memasukan negara target kedalam institusi yang ada. Hubungan erat yang terjalin dan kerjasama dalam institusi ini akan memberikan tekanan atau mengimbangi ancaman yang diberikan oleh negara target. (3) *Inter-institutional balancing* merupakan strategi *balancing* yang bisa menjadi *inclusive institutional balancing* ataupun *Exclusive institutional balancing* sesuai dengan keadaan yang terjadi. Keunggulan atau keunikan dari jenis strategi ini bukan tujuan dari *balancing*-nya, melainkan cara melakukan *balancing* ke institusi tersebut. Dalam startegi *balancing* ini, sebuah negara tidak hanya membentuk sebuah institusi baru, tetapi bermaksud juga untuk menggunakan institusi baru ini untuk menggantikan institusi yang lama. Dengan kata lain, target dari stategi *balancing* ini bukan hanya satu negara saja ini adalah lanjutan atau sambungan dari iinstitusi sebelumnya, yang intinya stategi ini adalah

strategi untuk melakukan *balancing* antara institusi yang baru dengan institusi yang lama.

Seperti yang disebutkan sebelumnya bahwa China dan Amerika Serikat memperebutkan kekuasaan di Kawasan Asia-Pasifik. Untuk mencapai kepentingan tersebut, China dan Amerika Serikat harus ikut berkontribusi di Kawasan tersebut, salah satunya melakukan Institutional balancing dengan institusi-institusi yang cukup berpengaruh di kawasan Asia-Pasifik seperti Forum Regional ASEAN (ARF), ASEAN Plus Three (APT), East Asia Summit (EAS). Melalui balancing dengan ke-tiga institusi tersebut menjadikan China dan Amerika Serikat memiliki kedudukan didalam kawasan Asia-Pasifik. Namun, strategi yang digunakan berbeda-beda dalam melakukan balancing dengan institusi tersebut, yang mana dalam ARF menerapkan strategi) *inclusive institutional balancing*, dalam APT menerapkan *Exclusive institutional balancing*, dan didalam EAS menerapkan *Inter-institutional balancing*.

ARF merupakan forum dialog yang formal, resmi, multilateral di kawasan asia-pasifik. Tujuan ARF adalah untuk menjaga dialog dan konsultasi antar negara anggota, serta membangun tingkat kepercayaan dan berdiplomasi di kawasan. Selain itu, Forum regional ASEAN (ARF) dirancang untuk membatasi atau mencegah sosialisasi perilaku kebijakan china pada tahun 1990-an (Foot, 1998). Anggota ARF pertama kali bertemu pada tahun 1994, yang terdiri dari seluruh anggota ASEAN, australia, bangladesh, kanada, china, uni eropa, india, jepang, kora utara. Kora selatan, mongolia, selandia baru, pakistan, papua nugini, rusia, timor timur, amerika serikat dan sri lanka. ARF tidak hanya membahas mengenai isu keamanan regional di asia tenggara, tetapi juga memperhatikan politik dunia seperti isu laut china selatan, isu semenanjung korea,

dan isu anti terorisme. China dan amerika Serikat melakukan strategi *inclusive institutional balancing*. China menyadari pentingnya melakukan inclusive institutional balancing melalui partisipasi dalam ARF

Di ARF, china pada dasarnya menhadapi tantangan dari dua pihak yaitu ASEAN dan Amerika Serikat. Yang mana ASEAN khawatir mengenai kebijakan china dalam isu laut china selatan, sedangkan amerika mengakui ARF sebagai institusi regional dan menggunakan ARF untuk meningkatkan transparansi pertahanan china (He, 2009). Contoh kasus dari tantangan yang dihadapi china di kawasan asia-pasifik adalah kasus Mischief Reef pada february tahun 1995, dari kasus tersebut bisa dilihat bagaimana reaksi China dalam menhadapi dua tantangan sekaligus. Dalam kasus ini, filipina menemukan bahwa angkatan laut china mengambil terumbu karang yang tidak berpenghuni di kepulauan spartly, dan hal tersebut menimbulkan ketegangan di seluruh negara di kawasan asia tenggara. Setelah itu, China mengalami tekanan diplomatik yang belum pernah terjadi sebelumnya dari negara anggota ASEAN, karena keinginan ASEAN untuk besatu melawan China sangat terlihat jelas (Wu, 2005).

Negara anggota ASEAN mencoba mengintegrasikan pembahasan mengenai isu laut china selatan kedalam ARF, dan amerika juga menyampaikan kekhawatirannya mengenai sengketa teritorial dan kebebasan bernavigasi di laut china selatan. Dalam kondisi tersebut, strategi terbaik china bukanlah memblok pembahasan mengenai laut china elatan dengan negara anggota ASEAN dan amerika. namun untuk mengakomodasikan inti kepentingan dan kekhawatiran utama dari negara anggota AEAN dan amerika, china menggunakan beberapa pendekatan seperti, china berkoordinasi dengan negara anggota ASEAN untuk membentuk peraturan

permaian didalam ARF, China juga mengakui kenyataan dari kepentingan amerika di kawasan, selain itu china berhasil menghalangi isu Taiwan masuk kedalam agenda ARF dari tahun 1994, dan china menunjukkan fleksibilitas diplomasi dalam isu laut china selatan dan menganjurkan penyelesaian masalah tersebut melalui cara-cara damai. Dengan melakukan *Inclusive Institutional Balancing* China berhasil mencapai tujuannya. Disatu sisi, China mengakomodasikan kepentingan Amerika Serikat di Asia Timur dan itu tuntutan untuk keamanan. Disisi lain, China mengurangu kecurigaan negara anggota ASEAN terhadap China.

Dilihat dari perubahan dari lingkungan keamanan regional setelah perang dingin, Amerika serikat mulai menyadari pentingnya melakukan kerjasama keamanan multilateral di kawasan Asia-Pasifik, dan berpartisipasi aktif dalam multi-dialog di struktur kawasan tersebut. Meskipun awalnya ARF mendapat kritikan karena memiliki komitmen yang tidak mengikat dan suka rela, bukannya perjanjian dan negosiasi resmi (Qi, 2019). Untuk Amerika Serikat, ARF membantu mempertahankan lingkungan yang damai di kawasan Asia-Pasifik dan mengamankan status dominan Amerika Serikat dalam paradigma keamanan di Asia-Pasifik. Amerika Serikat menaruh ARF sebagai instrumen untuk memastikan keterlibatannya terus berlanjut di kawasan Asia Timur (Emmers, 2001).

ASEAN Plus Three (APT) merupakan konferensi tidak resmi yang dilakukan oleh institusi regional ASEAN dengan tiga negara lain yaitu, China, Jepang, dan Korea Selatan yang diselenggarakan pada Desember 1997 di Hanoi, Vietnam. Didalam konferensi ini, China merupakan anggota terpenting dan Amerika Serikat tidak tergabung didalam konferensi ini. Alasan

penting mengapai para pendiri ASEAN dan China tidak mengikut sertakan Amerika Serikat Didalam ASEAN Plus Three ini karena Amerika Serikat menunjukkan sikap tidak acuh terhadap krisis ekonomi finansial di Asia Tenggara pada tahun 1997 sampai 1998. Sikap yang ditunjukkan Amerika Serikat terhadap krisis finansila di Asia tersebut menjadikan ingatan pahit tersendiri bagi negara anggota ASEAN.

Para anggota ASEAN sering kali merujuk pada keputusan Amerika Serikat untuk tidak memeberikan bantuan kepada Thailand ataupun negara ASEAN lainnya, tetapi mereka memebrikan bantuan kepada meksiko yang mengalami kejadian yang sama tiga setengah tahun yang lalu. Para negra anggota ASEAN juga percaya bahwa Amerika Serikat juga mendukung pada apa yang mereka lihat sebagai kondisi yang terlampau kasar yang diarahkan oleh IMF. Pada akhirnya mereka memutuskan untuk tidak mengandalkan Amerika Serikat pada saat itu. Krisis yang terjadi di kawasan Asia Tenggara memberikan China kesempatan diplomatik yang besar dan tak terduga, yang mana setelah itu China pemain aktif di kawasan tersebut di segala bidang sepeti, perdagangan, bantuan, keuangan, pariwisata, dan kemanan (Frost, 2006). Setelah kejadian krisis keuangan tersebut, negara-negara di Asia Tenggara mengubah sakit hati mereka terhadap IMF menjadi perasaan anti-Amerika. Para negara anggota ASEAN dari kejaian tersebut belajar bahwa Amerika Seikat bukanlah mitra ekonomi yang dibisa di andalkan. Dan setelah krisis tersebut ASEAN juga telah kembali mendapatkan dua proposal kerja sama yaitu, East Asian Economic Group (EAEG) dan East Asian Economic Caucus (EAEC) yang mana kedua proposal ini di bantu oleh Perdana Meeetri Malyasia Mahathir. Dari pembuatan dua proposal ini ASEAN berharap dapat mengembalikan stabilitas Mata uang di Kawasan Asia Tenggara.

Disini kita bisa melihat bahwa di dalam APT China dan ASEAN melakukan *Exclusive Institutional Balancing* terhadap Amerika Serikat. Didalam bukunya yang berjudul *Institutional Balancing in the Asia Pasifik: Economic Interdependence and China Rise's*, Kai He mengatakan bahwa Shanghai Cooperation Organization (SCO) dan APT merupakan dua pilar dari *Exclusive Institutional Balancing* yang dilakukan oleh China dalam melakukan perlawanan terhadap Amerika Serikat di bawah keadaan unipolaritas (He, 2009). Dengan melakukan *Exclusive Institutional Balancing* melalui APT, China memiliki dua tujuan dibelakangnya. Pertama, china berusaha mengubah APT yang awlanya merupakan blok ekonomi menjadi institusi multilateral yang komprehensif. Kedua, China ingin mempertahankan Amerika Serikat berada di 'laur pintu' dan disaat yang bersamaan juga, ASEAN melakukan strategi yang sama untuk Amerika Serikat. Dengan tidak mengikut sertakan Amerika Serikat di APT, dapat memperkuat kesatuan dari ASEAN dan mengurai ketergantungan ekonomi terhadap Amerika Serikat. dan juga dengan tidak mengikut sertakan Amerika Serikat dapat menekan Amerika Serikat itu sendiri dan tekanan tersebut membuat Amerika Serikat mengubah sikap arogannya terhadap ASEAN. terdapat poin penting yang harus di ingat bahwa meskipun mereka melakukan *Exclusive Institutional Balancing*, sejak awal ASEAN maupun China memang memiliki tujuan untuk menghadapi Amerika Serikat.

Melalui APT ini China memiliki tujuan untuk melakukan tawar menawar dengan Amerika Serikat yang mana hal tersebut terbukti sukses dalam perkembangan tawar menawar yang lebih baik dengan Amerika Serikat di kawasan Asia-Pasifik. Karena itu, China akan terus mendukung perkembangan APT dan akan terus mempromosikan kerjasama pragmatisnya. APT dan EAS, merupakan hubungan dari

sebuah inti dan sabuk pelindung bagi China (Qi and Shi, 2013). Amerika Serikat juga menyadari tingkah laku dari strategi *Exclusive Institutional Balancing* melalui APT tersebut, hal tersebut menjadikan Amerika berusaha meminimalisir kepentingannya didalam APT. yang mana hal tersebut pernah dilakukan oleh pihak Amerika Serikat pada masa Presiden George w. Bush dengan cara menganggap APT itu tidak penting dan menunjuka ketertarikannya kepada APEC. Pada saat masa kepemimpinan Barack Obama, Amerika juga melakukan hal serupa yaitu percaya bahwa TPP dapat menyeimbangi pengaruh APT (Yang, 2011).

Sebelum bergabung dengan East Asia Summit (EAS), ASEAN dan China melakukan *Exclusive Institutional Balancing* terhadap amerika Serikat. setelah Amerika Serikat bergabung dengan EAS pada tahun 2011, *Exclusive Institutional Balancing* berubah menjadi *Inclusive Institutional Balancing*. KTT pertama dari EAS di selenggarakan pada tanggal 15 Desember 2005 di Kuala Lumpur, Malaysia. Pada saat itu di hadiri oleh China, Jepang, Korea Selatan, Australia, Selandia Baru, dan India yang sekaligus menjadikan negara-negara tersebut sebagai anggota pertama yang bergabung dengan EAS. Pada awalnya memang ada perbedaan dari keanggotaan EAS yang mana China dan Malaysia ingin EAS untuk negara anggota APT saja. sedangkan Jepang, Australia Singapura, dan Indonesia ingin keanggotaan EAS melewati batasan wilayah. Yang pada akhirnya menemui titik tengah, yaitu dengan memeberika tiga kriteria negara yang boleh bergabung dengan EAS. Kriteria pertama, merupakan negara yang berdialog dengan negara anggota ASEAN. kedua, memiliki hubungan ekonomi yang signifikan dengan negara anggota ASEAN. ketiga, menjadi negara yang menandatangani perjanjian persahabatan dan kerjasama di Asia

Tenggara (TAC) (Frost, 2006). Dari ketiga kriteria tersebut, Australia, Selandia Baru, dan India memenuhi ketiganya, sedangkan Amerika Serikat hanya memenuhi kriteria pertama dan kedua. Yang mana Amerika belum memenuhi kriteria yang ke-tiga yaitu menjadi negara yang tergabung dalam TAC.

Selama persiapan EAS yang pertama, banyak cendekiawan Amerika Serikat meragukan EAS ini. Mereka berpendapat bahwa untuk apa dibentuknya EAS jika telah ada APEC dikawasan tersebut. Mereka juga berpendapat bahwa tujuan dibentuknya EAS adalah untuk menurunkan pengaruh Amerika Serikat dikawasan Asia Timur. Colin L. Powell yang merupakan Sekretaris Departemen Luar Negeri Amerika Serikat beranggapan bahwa tidak perlu mendirikan komunitas di kawasan Asia Timur. Ia juga memperingatkan bahwa negara-negara yang berdaulat bebas untuk memilih apa yang ingin mereka lakukan, tetapi jangan memilih cara yang melemahkan hubungan baik dan kuat yang telah terjalin antara Amerika Serikat dengan negara-negara di Asia (U.S. Department of State, 2004). Meskipun demikian, Amerika Serikat mulai merasa khawatir melihat pertumbuhan Cina yang cukup pesat dan pengaruh Cina juga terus meningkat di kawasan Asia. Pada tahun 2009 Amerika resmi menandatangani TAC dan menjadikan Amerika Serikat telah memenuhi ketiga kriteria untuk menjadi anggota EAS.

Dalam konteks *Inclusive Institutional Balancing*, China optimis dengan keanggotaan Amerika Serikat di EAS yang mana pada tahun 2010 didalam KTT kelima dari EAS, China menyatakan bahwa mereka menyambut Amerika Serikat untuk bergabung kedalam anggota EAS. Sebenarnya di dalam EAS ini, ASEAN memiliki kekhawatiran dan keraguan terhadap China. Oleh karena itu, ASEAN beranggapan bahwa dengan bergabungnya Amerika Serikat di EAS ini dapat menjadi

balancer bagi China. Ketika Amerika Serikat dimasukan kedalam EAS, Institusi ini dapat mengikat perilaku Amerika Serikat dan itu akan membantu untuk menyesuaikan diri dengan Amerika Serikat ataupun China (Qi, 2010). Didalam pembentukan East Asia Summit ini, China dan ASEAN menerapkan strategi *Inter-Institusional Balancing* dalam menghadapi Amerika Serikat. yang mana awalnya China dan ASEAN melakukan *Exclusive Institutional Balancing* terhadap China yang mana pada awalnya Amerika Serikat bukan bagian dari anggota EAS karena keinginan cakupan keanggotaan hanya untuk negara anggota APT saja. Namun, pada akhirnya mereka melakukan strategi *Inclusive Institutional Balancing* untuk menyeimbangi kekhawatiran yang muncul.

Kesimpulan

Melihat bahwa Kawasan asia-pasifik merupakan kawasan yang sangat strategis untuk melakukan kerjasama dibidang ekonomi maupun keamanan. Hal tersebut menjadikan kawasan ini sangat diperebutkan oleh dua negara hegemoni dalam bidang ekonomi yaitu, China dan Amerika Serikat. Untuk mencapai kepentingan tersebut, China dan Amerika Serikat harus ikut berkontribusi di Kawasan tersebut, salah satunya melakukan *Institutional balancing* dengan institusi-institusi yang cukup berpengaruh di kawasan Asia-Pasifik seperti Forum Regional ASEAN (ARF), ASEAN Plus Three (APT), East Asia Summit (EAS). China dan amerika Serikat melakukan strategi *inclusive institutional balancing* melalui partisipasinya di dalam ART. Dengan melakukan *Inclusive Institutional Balancing* China berhasil mencapai tujuannya. Disatu sisi, China mengakomodasikan kepentingan Amerika Serikat di Asia Timur dan itu tuntutan untuk keamanan. Disisi lain, China mengurugu kecurigaan negara anggota ASEAN terhadap China. Sedangkan Untuk

Amerika Serikat, ARF membantu mempertahankan lingkungan yang damai di kawasan Asia-Pasifik dan mengamankan status dominan Amerika Serikat dalam paradigma keamanan di Asia-Pasifik. Amerika Serikat menaruh ARF sebagai instrumen untuk memastikan keterlibatannya terus berlanjut di kawasan Asia Timur (Emmers, 2001).

Melalui APT, China dan ASEAN melakukan *Exclusive Institutional Balancing* terhadap Amerika Serikat. China memiliki dua tujuan dalam keikutsertaannya didalam APT. Pertama, China berusaha mengubah APT yang awalnya merupakan blok ekonomi menjadi institusi multilateral yang komprehensif. Kedua, China ingin mempertahankan Amerika Serikat berada di 'luar pintu' dan disaat yang bersamaan juga, ASEAN melakukan strategi yang sama untuk Amerika Serikat. Dengan tidak mengikutsertakan Amerika Serikat di APT, dapat memperkuat kesatuan dari ASEAN dan mengurangi ketergantungan ekonomi terhadap Amerika Serikat. melihat tujuan dari China dan ASEAN didalam APT, menjadikan Amerika Serikat berusaha meminimalisir kepentingannya didalam APT. Dan dalam pembentukan East Asia Summit ini, China dan ASEAN menerapkan strategi *Inter-Institutional Balancing* dalam menghadapi Amerika Serikat. yang mana awalnya China dan ASEAN melakukan *Exclusive Institutional Balancing* terhadap China yang mana pada awalnya Amerika Serikat bukan bagian dari anggota EAS karena keinginan cakupan keanggotaan hanya untuk negara anggota APT saja. Namun, pada akhirnya mereka melakukan strategi *Inclusive Institutional Balancing* untuk menyeimbangi kekhawatiran yang muncul.

Daftar Pustaka

JURNAL :

- Emmers, R. (2001) 'The Influence of the Balance of Power Factor within the ASEAN Regional Forum', *Contemporary Southeast Asia: A Journal of International & Strategic Affairs*, 23(2), pp. 275–291.
- Foot, R. (1998) 'China in the ASEAN Regional Forum: Organizational Processes and Domestic Modes of Thought', *Asian Survey*, 38 (5), pp. 425–440.
- HAMILTON, W. S. (1991) 'COUNTRY-SPECIFIC ADVANTAGE AND INTERNATIONAL COOPERATION', *Strategic Management Journal*, pp. 419–431.
- He, K. (2008a) 'Institutional Balancing and International Relations Theory: Economic Interdependence and Balance of Power Strategies in Southeast Asia', *European Journal of International Relations*, Vol. 14(3), pp. 489–518.
- He, K. (2008b) 'Institutional Balancing in the Asia Pacific China's rise and the institutionalization of security in the Asia Pacific', in *Institutional Balancing in the Asia Pacific*. Abingdon: Routledge, pp. 1–15.
- He, K. (2009) *Institutional Balancing in the Asia-Pacific : Economic Interdependence and China's Rise*. 1st ed. New York: Routledge.
- He, K. (2012) 'Undermining adversaries: Unipolarity, threat perception, and negative balancing strategies after the Cold War', *Security Studies*, vol.21(2), pp. 154–191.
- He, K. (2015) 'Contested regional orders and institutional balancing in the Asia Pacific', *Department of Political Science, The University of*

- Copenhagen*, NO. 52, pp. 208–222.
- He, K. (2018) ‘Role conceptions, order transition and institutional balancing in the Asia-Pacific: a new theoretical framework’, *AUSTRALIAN JOURNAL OF INTERNATIONAL AFFAIRS*, VOL. 72, N, pp. 92–109.
- Qi, H. (2010) ‘Institutional Change in International System and the Peaceful Transition in East Asia: An Institutional Perspective’, *World Economics and Politics*, 356, pp. 54–68.
- Qi, H. (2019) ‘China-U.S. Institutional Balancing in the Asia-Pacific and Its Implications to China’s Foreign Policy Choices’, *Asian Journal of International Studies*, Vol. 24 (1), pp. 1–19.
- Qi, H. and Shi, Y. (2013) ‘China’s Peripheral Security Challenges and its Pan-Peripheral Diplomatic Strategy’, *World Economics and Politics*, 394, pp. 25–46.
- Yang, J. (2011) ‘An Analysis of the Adjustments of the Obama Administration’s Global Strategy’, *International Studies*, 142, pp. 19–22.
- INTERNET :**
- Asian Development Bank (2008) *Emerging Asian Regionalism*. Manila.
- Kissinger, H. (2014) *World Order*. New York: Penguin.
- Nye, J. (2003) *Understanding International Conflicts*. 4th ed. New York: Longman.
- Wu, S. (2005) *Zonglun Nansha zhengduan (A Study on the South China Sea Dispute)*. Haikou: Hainan Press.
- U.S. Department of State (2004) *Secretary of State Colin Powell: Roundtable with Japanese Journalists*. Available at: <http://20012009.state.gov/se%0Acretary/former/powell/remarks/35204.htm>
- Frost, E. (2006) *Re-Engaging with Southeast Asia, Pacific Forum CSIS*. Honolulu, Hawaii.